

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik mempunyai peran penting dalam melayani masyarakat, diperlukan pengendalian yang optimal dimana suatu pelayanan ada anggaran yang tertera disana. Menurut Damayanti dkk (2014) menyatakan bahwa dalam penggunaan anggaran organisasi sektor publik atau pemerintah berperan sangat penting, dimana estimasi anggaran yang diperoleh pemerintah berasal dari publik dan digunakan untuk publik sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan sebuah objek tentang Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berbatasan langsung bagian utara Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk. Bagian timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, bagian selatan Kabupaten Pacitan, Bagian barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri Jawa Tengah (www.ponorogo.go.id, Diakses tanggal 30 November 2020)

Karyawan merespon pada organisasi sektor publik tersebut, baik dan buruknya tergantung pada pemerintah dalam penggunaan anggarannya, dengan demikian anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah atau sektor publik melalui kebijakan otonomi daerah. Aturan otonomi daerah ini, ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana dijelaskan beberapa tentang desentralisasi, dalam pemerintahan menyerahkan wewenangnya kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dengan sendirinya, contohnya mengatur dan mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implikasi dari undang-undang tersebut adalah mengacu sebuah sistem keuangan yang dimana diatur dengan dalam pemerintah daerah secara

sendirinya. Demikian tujuan ini berimplikasi dengan otonomi daerah, karena dapat tercapai dan terciptanya anggaran yang di akuntabilitas publik (Sari, 2019).

Helmy (2020) menyatakan bahwa pada organisasi publik terkait dengan anggaran harusnya sudah merencanakan anggaran yang terbaik, dimana informasi mengenai anggaran tersebut harus wajib disebarakan kepada masyarakat agar tidak terjadi perselisihan dan untuk mendapatkan kritik maupun saran demi menciptakan perencanaan anggaran yang baik, dalam anggaran memiliki sebuah pengertian dan fungsi tersendiri dimana dalam sebuah organisasi sektor publik memiliki peran penting, anggaran merupakan sebuah alat pengendalian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aktivitas perencanaan anggaran pada organisasi tersebut dengan mempunyai tujuan keberhasilan organisasi dimasa mendatang (Yeandrawita, 2015).

Yeandrawita (2015) menyatakan pada suatu anggaran pasti ada acuan untuk menuju sebuah tujuan atau sebagai penentu tujuan organisasi sektor publik, dalam makna lain sebagai perangkat pengimplementasian tujuan anggaran tersebut. Masalah yang sering terjadi di organisasi sektor publik adalah pada estimasi anggarannya, dimana sebuah pegawai tingkat bawah dalam menyusun anggaran biayanya lebih besar dari pada penyusunan anggaran pendapatan. Dapat disimpulkan mengenai pengelolaan keuangan yang anggarannya terlalu besar akan mengakibatkan sebuah kesenjangan anggaran, pada dasarnya mengenai anggaran terlalu besar dalam program kerja tersebut tingkat efektifitas dan efisiensi kurang atau program kerja tersebut maksud dan tujuannya diluar dari

organisasi sektor publik. Banyak faktor yang mempengaruhi anggaran biaya dikarenakan ada sebuah kesenjangan anggaran.

Perdana dkk, (2017) menyatakan bahwa kesenjangan anggaran adalah sebuah sikap atau perilaku disfungsi dimana perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja pada pegawai tingkat bawah dan bisa merugikan organisasi. Pada kesenjangan anggaran terjadi pada sebuah penyusunan anggaran yang dilakukan bawahan dengan menganggarkan biaya yang lebih besar dengan anggaran pendapatan dimana dalam perencanaan biaya bisa tercapai dengan mudah. Dalam keadaan ini dapat dilihat pada sebuah tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019 yaitu :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Biaya Belanja Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019
Dalam bentuk Rupiah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
2015	2.064.166.508.678	1.894.974.865.710	169.191.642.968
2016	2.253.703.535.000	2.100.639.906.305	153.063.628.695
2017	1.906.439.339.829	1.832.144.056.222	74.295.283.607
2018	1.909.845.549.406	1.798.636.874.854	111.208.674.552
2019	2.040.024.709.580	1.965.449.619.574	74.575.090.006

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo 2015-2019

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2019 mengalami selisih yang cukup besar, dimana anggaran yang direncanakan lebih besar dari pada realisasi anggaran.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2019
Dalam bentuk Rupiah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
2015	1.864.337.393.996	1.866.869.447.087	2.532.053.091
2016	2.108.777.984.508	2.026.630.853.798	(82.147.130.710)
2017	2.246.177.607.360	2.215.197.920.702	(30.979.686.658)
2018	2.280.253.624.958	2.300.334.167.916	20.080.542.958
2019	2.306.442.530.030	2.333.225.023.231	26.782.493.201

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo 2015-2019

Tabel 1.2 laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015-2019 pada Kabupaten Ponorogo bahwa anggaran pendapatan mendapatkan selisih yang lebih besar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dimana tingkat penganggaran pendapatan lebih besar daripada realisasi pendapatan yang ditetapkan, maka dari itu anggaran dan realisasi terdapat selisih cukup banyak, sesuai anggapan Umangasadji (2019) yang berpendapat bahwa pada kesenjangan anggaran adalah terjadinya selisih anggaran biaya atau pendapatan yang sudah disahkan dengan anggaran realisasi.

SKPD Kabupaten Ponorogo memiliki faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini mengambil indikasi 3 faktor yang dibentuk dalam variabel penelitian. Faktor pertama, penekanan anggaran yaitu suatu desakan tugas dari atasan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat sebaik-baiknya, faktor kedua memilih reputasi yaitu sebuah perilaku *opportunist* yang mengedepankan kepentingan sendiri dengan mengambil kesempatan yang ada, dan yang terakhir yaitu faktor ambiguitas peran merupakan adanya sebuah kurangnya informasi atau tidak adanya informasi yang disampaikan oleh atasan dengan kata lain tidak tau tugas-tugas apa yang harus dikerjakan.

Nopriyani (2016) menyatakan bahwa penekanan anggaran adalah sebuah dorongan bermula dari pemimpin atau atasan pada pegawai tingkat bawah demi menjalankan kinerja anggaran yang telah direncanakan dengan baik sesuai ditetapkannya anggaran tersebut. Maka dari itu seandainya suatu anggaran daerah yang sangat tinggi dan pendapatan daerah yang senantiasa biasa-biasa, intinya menguatkan sebuah faktor kesenjangan anggaran dimana bawahan dinilai pada

tingkat kinerja suatu anggaran yang telah disusun. Evaluasi kinerja pada pegawai dinilai dari tingkat keberhasilan tercapainya anggaran atau ketidakefektifannya anggaran, dimana sebuah keberhasilan tercapainya anggaran akan terjadi sebuah bonus atau reward pada seorang pegawai, apabila tidak tercapainya suatu anggaran pegawai akan mendapatkan sanksi dari atasan (Guswandi, 2017).

Dewi dkk, (2017) menyatakan bahwa reputasi merupakan suatu sikap yang ada disorang pegawai dimana sebuah sikap atau perilaku *opportunist*, dengan maksud mementingkan diri sendiri atas kesempatan yang ada didepan mata seorang pegawai. Dalam sebuah sikap *opportunist* pegawai bawahan dalam mengerjakan rencana anggaran bisa dikatakan bisa mencuri kesempatan yang ada atau peluang bagi dirinya sendiri untuk merugikan suatu instansi. Menurut Damayanti dan Wirasedana (2014) menyatakan bahwa reputasi dapat dihubungkan dalam sebuah aturan kemasyarakatan tergolong dengan adanya sifat jujur, adil, dan menjauhi sebuah kegagalan, serta tindakan licik saat perencanaan anggaran yang bisa diteliti dalam kinerja bawahan.

Faktor lain dalam kesenjangan anggaran ada pada ambiguitas peran merupakan sesuatu yang diharapkan seseorang tapi tidak diketahui arah kejelasannya. Dalam ambiguitas peran terjadi pada kinerja tingkat bawah dimana atasan tidak memberikan informasi dengan jelas dengan kata lain kurangnya laporan pada kinerja tingkat bawah yang disampaikan atasan, menimbulkan ketidaktahuan atas kerja yang dijalani. Ambiguitas peran jika dihubungkan dengan kinerja bawahan yang mengalami sebuah ambiguitas peran dalam perencanaan anggaran, maka sebuah laporan dari kinerja bawahan yang menyimpang dengan menyebabkan anggaran yang cukup besar yang menetapkan

sebuah estimasi anggaran yang tidak sesuai. Pada situasi tersebut mengakibatkan kesenjangan anggaran (Mukaromah dkk, 2015).

Pengaruh penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada penelitian yang dilakukan Guswandi (2015) mengemukakan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif pada kesenjangan anggaran dalam SKPD Kabupaten Bulukamba. Dan berbeda dengan penelitian Bangun dkk, (2012) menyatakan bahwa penekanan anggaran tidak berpengaruh alias negatif terhadap kesenjangan anggaran.

Pengaruh reputasi terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Pemerintah Kota Denpasar sempat diteliti Wirasedana dkk (2014) menyatakan bahwa reputasi berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran, sama halnya dengan penelitian dari Melani (2020) menyatakan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif pada kesenjangan anggaran. Dan sebaliknya pada reputasi terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Jember dalam penelitian oleh Sulindawati dkk, (2014) menyatakan bahwa reputasi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Jember.

Penelitian terdahulu yang diteliti Sofyan dkk, (2019) tentang pengaruh ambiguitas peran terhadap kesenjangan anggaran pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mempunyai pengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran pada OPD Kota Bukittinggi tersebut. Dan sebaliknya dalam ambiguitas peran terhadap kesenjangan anggaran pada Dinas Pemerintahan Kota Tegal yang diteliti Suryandari dkk, (2015) menyatakan bahwa ambiguitas peran tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada Dinas Pemerintahan Kota Tegal.

Pengungkapan peneliti terdahulu pada kesenjangan anggaran yang melibatkan sebuah organisasi sektor publik atau pemerintah, dimana peneliti melakukan penelitian dengan meneliti dampak-dampak yang terkait untuk mendorong sebuah kesenjangan anggaran. Dimana penelitian ini ditujukan pada organisasi sektor publik yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo dengan sasaran untuk mendapatkan bukti-bukti atau aspek-aspek yang berpengaruh positif terkait munculnya kesenjangan anggaran. Variabel yang dipilih dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari beberapa penelitian terdahulu, selain itu variabel yang dipilih merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan anggaran, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti pengaruh penekanan anggaran, reputasi, dan ambiguitas peran terhadap kesenjangan anggaran. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda untuk dua variabel atau lebih, menurut Santoso (2015) analisis regresi linear berganda dipakai penelitian untuk mengerti pengaruh atau dampak lebih dari satu variabel independen.

Deskripsi dan fenomena diatas yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, diharapkan mempunyai hasil yang maksimal dan sesuai dengan keinginan pada peneliti. Penjabaran diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Penekanan Anggaran, Reputasi, dan Ambiguitas Peran Terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi pada SKPD Kabupaten Ponorogo).**

1.2 Perumusan Masalah

Ringkasan masalah penelitian ini seperti uraian latar belakang diatas, bahwa mempunyai beberapa faktor tentang kesenjangan anggaran. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah penekanan anggaran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah reputasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah ambiguitas peran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Ponorogo ?
4. Apakah penekanan anggaran, reputasi dan ambiguitas peran berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Ponorogo ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan yang dimana memperlihatkan sebuah penelitian yang diuji secara benar dari sebuah penelitian atau pendalaman yang sudah ada, serta untuk menguraikan penelitian yang ada. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh penekanan anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh reputasi terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh ambiguitas peran terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

4. Mengetahui pengaruh penekanan anggaran, reputasi dan ambiguitas peran terhadap kesenjangan anggaran terhadap SKPD Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mempunyai sebuah pengertian yaitu sebuah kegunaan atau daya yang digunakan untuk pihak-pihak yang bersangkutan berupa sebuah evaluasi yang diberi oleh peneliti setelah penelitiannya selesai. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan tambahan untuk literatur atau referensi dalam melakukan penelitian kedepannya pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai informasi mengenai “Pengaruh Penekanan Anggaran, Reputasi, dan Ambiguitas Peran Terhadap Kesenjangan Anggaran”

2. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana pada SKPD tersebut mampu mengevaluasi para pegawainya pada sebuah penyusunan anggaran agar terhindar dari kesenjangan anggaran. Sehingga pada SKPD tersebut mampu menciptakan penganggaran secara efektif dan efisien.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai penghubung pada sebuah sarana menambah wawasan, pengetahuan, dan berbagai ilmu yang telah dipelajari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi atau literatur dimasa yang akan datang dimana sebuah peneliti menjadikan tema penelitian yang sama dan menjadikan sebuah gambaran atau acuan dalam penelitian kedepannya.

